

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Perimbangan

2.1.1.1 Definisi Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan menurut Nauw & Riharjo, (2021) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mewujudkan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

2.1.1.2 Tujuan Dana Perimbangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menentukan bahwa tujuan dana perimbangan adalah menyalurkan dana kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini bertujuan untuk membantu pendanaan berbagai kebutuhan dan kegiatan daerah, seperti pelayanan publik, infrastruktur, serta berbagai pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dana transfer ke daerah atau dana perimbangan biasanya digunakan untuk:

1. Membantu daerah yang memiliki pendapatan yang rendah;
2. Pemerataan pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Mendukung otonomi daerah.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari dana transfer atau dana perimbangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Dana transfer atau dana perimbangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.1.3.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah jenis dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah, berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara. Tujuannya adalah untuk mendanai

kebutuhan daerah dan mendukung proses desentralisasi. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Sama halnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan persentase tertentu yang diberikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah non penghasil, serta membantu meningkatkan pemerataan di suatu wilayah.

Dasar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) biasanya berkaitan dengan mekanisme bagaimana pendapatan dari pemanfaatan sumber daya yang terletak di suatu daerah tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri serta PPh Pasal 21.

Sementara itu, dana bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam mencakup:

1. Kehutanan;
2. Pertambangan umum;

3. Perikanan;
4. Pertambangan minyak bumi;
5. Pertambangan gas;
6. Pertambangan panas bumi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK.07/2022, disebutkan bahwa sumber dana bagi hasil selain dari hasil pajak dan sumber daya alam. Sumber dana tersebut adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT. Dana ini merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

2.1.1.3.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendorong kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (DOK) merumuskan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pimpinan pengelolaan TKD menyampaikan indikasi kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) disusun dengan memperhatikan:

- a. Perkiraan celah fiskal per daerah secara nasional;

- b. Kebutuhan pendanaan untuk menjalankan tugas pemerintah daerah, termasuk biaya pegawai, belanja operasional, dan layanan publik;
- c. Perkiraan Dana Alokasi Umum (DAU) selama tiga tahun terakhir.
- d. Perkiraan penerimaan netto dari sumber dalam negeri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (DOK), jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) dibatasi dengan cara menghitung berdasarkan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri netto yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang APBN. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) secara keseluruhan harus mencapai minimal 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang tertuang dalam APBN. Berdasarkan hal tersebut, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa proporsi DAU untuk daerah Kabupaten/Kota ditentukan sebesar 90% dari jumlah DAU secara keseluruhan, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki sifat *block grants*, yang berarti dana tersebut dapat digunakan secara fleksibel seperti dana hibah, tanpa banyak pembatasan.

2.1.1.3.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 72 Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan

dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain digunakan untuk membiayai kegiatan khusus juga diperuntukkan dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum memenuhi standar dan untuk mendorong pembangunan di daerah. Tujuan utama dari DAK yaitu untuk membantu pemerintah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 131 Ayat 3 dana alokasi khusus terdiri atas:

- a. Dana alokasi khusus fisik, yang digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana daerah;
- b. Dana alokasi khusus non fisik, yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional daerah; dan
- c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukungnya pembangunan fisik dan peningkatan kualitas layanan publik daerah tertentu.

2.1.1.4 Pengukuran Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berikut perhitungan rumusnya:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DBH} + \text{DAU} + \text{DAK}$$

2.1.2 Belanja Pegawai

2.1.2.1 Definisi Belanja Pegawai

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 146 ayat (1) Belanja Pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pegawai, yang meliputi aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Belanja pegawai daerah sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, serta tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya.

Sedangkan, menurut Defitri, (2020) belanja pegawai adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut dalam mendukung tugas dan fungsi dari unit organisasi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 146, diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan anggaran belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dengan batas maksimal 30% dari total belanja APBD.

2.1.2.2 Pengukuran Belanja Pegawai

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 146, belanja pegawai merupakan salah satu komponen dalam belanja daerah yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pegawai pemerintah daerah. Belanja pegawai ini mencakup aparatur sipil negara, kepala daerah, serta anggota DPRD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, belanja pegawai menjadi salah satu indikator penting dalam struktur belanja daerah karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran untuk sumber daya manusia pemerintahan. Berikut perhitungan rumusnya:

$$\text{Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Definisi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Efriyanto, Herawati, & Sari, (2023) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri serta melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pembangunannya sendiri dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019:140).

Adapun menurut Mahardika & Fauzan, (2022) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah menggantungkan diri pada sumber dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin rendah pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat membuat daerah mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Begitu pula dengan keuangan daerah, dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan transfer pusat dan provinsi serta pinjaman. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan suatu daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

2.1.3.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019:140). Berikut perhitungan rumusnya:

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Rumus ini menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang mengukur sejauh mana daerah mampu membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan menggunakan PAD dibandingkan dengan Transfer Pusat dan Provinsi serta Pinjaman. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.

Dengan kriteria pola hubungan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Pola Hubungan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25 – 50%	Konsultatif
Sedang	>50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100%	Delegatif

Sumber: Yahya & S, (2022)

1. Pola hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat itu lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah. Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pola hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap sudah lebih mampu dalam menjalankan otonomi daerah;
3. Pola hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang karena daerah telah cukup mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah;
4. Pola hubungan Delegatif, pemerintah pusat tidak lagi campur tangan karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sumber: Yahya & S, (2022)

2.1.4 Stewardship Theory

Stewardship Theory dapat dihubungkan dengan sektor publik karena pihak *steward* bertindak berdasarkan keinginan *principal*. Yang berarti pihak pemerintah akan melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Teori *stewardship* mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi menggambarkan *output* yang maksimal akan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal terhadap pihak *principal* akan menilai kinerja yang dilakukan oleh *steward* sangat baik (Oktaliza et al., 2020).

Menurut Mulia & Widiatmoko, (2025) dana perimbangan dapat dipahami sebagai sumber dana yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Dalam *teori stewardship*, aparat pemerintah dipandang sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan publik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dana yang berasal dari pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran, tetapi juga dikelola secara efektif dan bertanggung jawab agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, alokasi belanja pegawai menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam perspektif *stewardship theory*, aparat pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan belanja pegawai yang tepat dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur, sehingga berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan dan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi sumber daya dan penguatan kapasitas fiskal daerah (Hapsari et al, 2025).

Dengan demikian, pengelolaan dana perimbangan dan belanja pegawai yang dilakukan secara efektif dalam perspektif *stewardship theory* menunjukkan bahwa keduanya berperan dalam mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah. Melalui pengelolaan yang optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu

memperkuat kapasitas fiskalnya sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

2.1.5 Kajian Empiris Terdahulu

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis akan meneliti Pengaruh Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020-2025. Penulis juga mengambil beberapa referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian ini sebagai berikut:

1. Novi Darmayanti, Laely Aghe Africa, Damayanti, & Rikah, (2022) meneliti tentang *The Effect Of Locally Generated Revenue and Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence* yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di Kabupaten Lamongan dari tahun 2012-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik penentuan sampel berupa sampel jenuh. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Lamongan dan dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. R. Neneng Rina Andriani & Nisa Noor Wahid, (2018) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di Kota Tasikmalaya dari tahun 2006-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Doves Ardinugroho, Albertus Maqrus Soesilo, & Mulyanto, (2021) meneliti tentang *The Effect of Regional Income, Balanced Funds and Regional Expenditures on Regional Financial Independence* yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan belanja

daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4. Nadya Putri Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, (2021) meneliti tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 34 Provinsi Indonesia dari tahun 2017-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana perimbangan, retribusi daerah, dan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Hostaf Prio Da Gama, Rusman Soleman, & Hartaty Hadady, (2022) meneliti tentang *Analysis of the Effect of Regional Income and Balanced Funds on Regional Financial Independence* yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara dari tahun 2015-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli

daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama (simultan), pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.

6. Riyans Ardiansyah, (2023) meneliti tentang Determinan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif deskriptif kausalitas dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di Kota Tarakan tahun 2013-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Tarakan.
7. Eny Wahyuni & Lilis Ardini, (2019) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier

berganda dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitiannya yaitu kinerja pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan belanja pegawai secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

8. Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, & Hanly F. DJ Siwu, (2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif deskriptif kausalitas dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2009-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara bersamaan (simultan), pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.
9. Rahmat Saleh, (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif *explanatory survey* dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di

Kabupaten Bogor pada tahun 2012-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersamaan (simultan), pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

10. Machfud, Asnawi, & Naz'aina, (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana otonomi khusus secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
11. Inul Rofiq & Fefri Indra Arza, (2021) meneliti tentang Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status

Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Belanja Pegawai, dan *Leverage* Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif asosiatif kausal dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 19 kabupaten/kota Sumatera Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitiannya yaitu status pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan *leverage* (utang) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan belanja pegawai secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

12. Lulu Syifa Fadhila & Dewi Susilowati, (2025) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah yang penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan data sekunder dan peneliti tersebut menggunakan populasi pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2021. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan secara bersama-sama (simultan), pendapatan asli

daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

13. Siska Yulia Defitri, (2020) meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan data metode pengumpulan data studi dokumentasi dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2017. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, belanja pegawai secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Keuangan daerah. Secara simultan belanja modal dan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
14. Shalhhakka Dimar Farrakhy & Sofia Prima Dewi, (2025) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 39 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2019-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil Penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dana

perimbangan dan belanja pegawai secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan secara simultan pendapatan asli daerah, dana keseimbangan, belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

15. Alifia Aprilianti Cahya & Ridwan, (2025) meneliti tentang Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder dan tempat penelitiannya di 13 Kabupaten/Kota Jawa Barat pada tahun 2019-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu secara bersama-sama (simultan), retribusi daerah, dana keseimbangan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, secara parsial (individu), hanya dana keseimbangan dan belanja modal yang berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
16. Sindy Utami & Maulidah Narastri, (2025) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan tempat penelitiannya di 38 Kabupaten/Kota Jawa

Timur Tahun 2020-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik penentuan sampel berupa sampel jenuh. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah dan belanja pegawai secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama (simultan), pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

17. Wike Nurliza Arpani & Halmawati, (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau periode tahun 2010-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* dengan teknik penentuan sampel berupa total *sampling*. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

18. Baldric Siregar & Nurna Pratiwi, (2017) yang meneliti tentang *The Effect Of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economy Growth and Human Development Index in Indonesia* yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan tempat penelitiannya seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitiannya yaitu ukuran, usia, status, populasi, jumlah SKPD, dan *leverage* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
19. Ridho Wahyu Ginting, Ningrum Trija Kesuma, Nurul Mizna Sukma, & Iskandar Muda (2024) meneliti tentang *The Effect of Local Government Size, Wealth, Balancing Funds, Capital Expenditures, Employee expenditures and Budget Financing Surplus (SILPA) on Regional Financial Independence in Regency/City Governments in North Sumatera Province* yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 28 Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil Penelitiannya yaitu belanja modal dan belanja pegawai secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan belanja modal, belanja pegawai, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

20. Ema Nur Indah Fitriyani & Agus Endro Suwarno, (2021) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan tempat penelitiannya di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2016-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling*. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah. Belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja pegawai secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli Daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Untuk menilai lebih lanjut mengenai tingkat orisinalitas dari penelitian ini disajikan pada tabel 2.2 yang akan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan rencana penelitian penulis, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Tabel 2.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Novi Darmayanti, Laely Aghe Africa, Damayanti, Rikah, 2012-2019, Kabupaten Lamongan	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan daerah. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah. Tempat Penelitian: Kabupaten Lamongan. Periode Penelitian: 2012-2019 Metode analisis data: Regresi Linier Berganda.	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Tourism Economics and Policy</i>, Vol 2 No 3, hlm. 112-122, tahun 2022. P-ISSN: 2775-2283 (Print). E-ISSN: 2807-2839 (Online)

				Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
2	R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid, 2006-2015, Kota Tasikmalaya	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: (Kemandirian Keuangan Daerah).	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah. Periode penelitian: 2006-2015. Tempat Penelitian: Kota Tasikmalaya. Metode analisis data: Analisis Regresi Berganda.	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018, hlm. 30-39 (scholar). ISSN: 1907-9958 (Print)
				Secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
3	Dowes Ardinugroho, Albertus Maqnu Soesilo, Mulyanto,	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan	<i>Budapest International Research and Critics</i>

	2014-2018, Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode analisis data: Regresi Data Panel	Tempat penelitian: di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode penelitian: 2014-2018	terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	<i>Institute- Journal.</i> Volume 4, Nomor 2. Mei 2021. Hal 3282- 3293. ISSN: 2615- 1715 (Cetak), 2615- 3076 (Online).
4	Nadya Putri Saraswati, Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2017-2019, Seluruh Provinsi Indonesia	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal. Tempat penelitian: di seluruh provinsi Indonesia. Periode Penelitian: 2017-2019. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda	Pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana perimbangan, retribusi daerah,	<i>Prosiding BIEMA (Business Managem ent, Economic , and Accountin g National Seminar,</i> Volume 2, 20 Agustus 2021. Hal: 51- 64

					dan belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
5	Hostaf Prio Da Gama, Rusman Soleman, Hartaty Hadady, 2015-2019, Pada Kab/Kota di Provinsi Maluku Utara	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode analisis data: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah. Tempat penelitian: di Kab/Kota Provinsi Maluku Utara. Periode Penelitian: 2015-2019. Sampel yang digunakan adalah metode <i>purposive sampling</i> .	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama (simultan), pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.	Jurnal <i>Economic Resources</i> . Volume: 5, Nomor (Issue): 1. Tahun Terbit: 2022.	
6	Riyans Ardiansyah, 2013-2022, Kota Tarakan	Variabel Independen: Dana Perimbangan Variabel Dependen:	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Tempat penelitian:	Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap	Jurnal JPRO. Volume & Nomor: Vol. 4, No. 1	

		Kemandirian Keuangan Daerah.	di Tarakan Periode penelitian: 2013-2022. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda.	Kota kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dan secara simultan, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kota Tarakan.	Tahun202 3E-ISSN: 2775- 5967.
7	Eny Wahyuni, Lilis Ardini, 2013-2016, Pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Belanja Pegawai Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Kinerja PAD dan Belanja Modal Periode penelitian: 2013-2016 Tempat penelitian: di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah metode <i>purposive sampling</i> . Metode	Kinerja pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja Pegawai secara parsial	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , Volume & Nomor: Volume 7, Nomor 6. Bulan Terbit: Juni 2018. e-ISSN: 2460- 0585.

				analisis data: Regresi Linier Berganda.	berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	
8	Siti Raun Kristina, Amran T. Naukoko, Hanly F. DJ Siwu, 2009- 2017, Kabupaten Halmahera Tengah.	Variabel Independen Dana Perimbangan Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Tempat penelitiannya di Halmahera Tengah Periode penelitian: 2009-2017. Metode analisis data: Analisis Regresi Berganda.	Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dan secara bersamaan (simultan), pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah.	Jurnal EMBA, Volume & Nomor: Vol. 9, No. 1, & Tahun Terbit: Januari 2021, halaman: 453-461. ISSN: 2303- 1174	
9	Rahmat Saleh, 2012-	Variabel Independen:	Variabel Independen	Pendapatan asli daerah secara	Jurnal Informasi,	

	2017, Kabupaten Bogor	Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	nya Pendapatan Asli Daerah. Tempat penelitian: Kabupaten Bogor. Periode penelitian: 2012-2017. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda	parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersamaan (simultan), Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Perpajakan, Akuntansi , dan Keuangan Publik. Volume & Nomor: Vol. 15, No. 2. Bulan & Tahun Terbit: Juli 2020. Halaman: 111-134. ISSN: 2685- 6441 (Online), 1907- 7769 (Cetak).
10	Machfud, Asnawi, Naz'aina, 2013-2018, Di Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode analisis data: Regresi Data Panel.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan. Tempat penelitian: di Kabupaten/Ko ta Provinsi Aceh. Periode penelitian: 2013-2018.	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana otonomi	Jurnal Manajem en Indonesia (J- MIND). Volume & Nomor: Vol. 5, No. 1. Bulan & Tahun Terbit: Januari - Juni 2020. ISSN: 2503- 4367.

					khusus secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	
11	Inul Fefri Arza, 2015-2019, Pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Rofiq, Indra, 2015-2019, Pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	Variabel Independen: Belanja Pegawai). Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Status Pemerintah daerah, Jumlah Penduduk, Leverage, Ukuran Pemerintah, dan Jumlah SKPD. Tempat penelitian: di Sumatera Barat. Sampel yang digunakan adalah metode <i>purposive sampling</i>. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda.	Status pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan <i>leverage</i> (utang) secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan belanja pegawai secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Eksplorasi i Akuntansi (JEA). Volume & Nomor: Vol. 3, No. 3. Bulan & Tahun Terbit: Agustus 2021. Halaman: 705-719. e-ISSN: 2656-3649 (Online).
12	Lulu Fadhila,	Syifa	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Pendapatan asli daerah secara	Ekonomik a 45:

	Dewi Susilowati, 2018-2021, Seluruh Provinsi di Indonesia.	Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode analisis data: Regresi Data Panel.	Pendapatan Asli Daerah. Tempat penelitian: di seluruh Provinsi Indonesia. Periode penelitian: 2018-2021.	parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Secara bersama-sama (simultan), pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah	Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan. Volume & Nomor: Vol. 12, No. 2. Bulan & Tahun Terbit: Juni 2025. Halaman: 1428-1448. e-ISSN: 2798-575X. p-ISSN: 2354-6581.
13	Siska Yulia Defitri, 2016-2017, Pada Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Barat).	Variabel Independen: Belanja Pegawai. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Belanja Modal Tempat penelitian: di Kab/Kota Provinsi Sumatera Tengah. Periode Penelitian: 2016-2017. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda.	Belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, belanja modal	Jurnal: Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi. Volume & Nomor: Vol. 19, No. 02. Bulan & Tahun Terbit: Desember 2020. ISSN: 2623-2480

				dan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	(Online), 1693-5209 (Cetak)
14	Shalhhakka Dimar Farrakhy, Sofia Prima Dewi, 2019-2023, Pada Provinsi Jawa Timur.	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Variabel dependen: Kemandirian Keuangan Daerah. Metode analisis data: Regresi Data Panel.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tempat penelitian: di Jawa Timur. Periode penelitian: 2019-2023. Sampel yang digunakan adalah <i>non-probability sampling</i> dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	Pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial dan belanja pegawai tidak berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Indonesia. Volume & Nomor: 5 (10). Tahun Terbit: 2025. p-ISSN: 2774-6291. e-ISSN: 2774-6534
15	Alifia Aprilianti Cahya,	Variabel Independen: Dana	Variabel Independen: Retribusi	Secara simultan, retribusi daerah, dana	Jurnal Bisnis, Manajemen

	Ridwan, 2019-2023, Pada 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.	Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	daerah dan Belanja modal. Tempat penelitian: hanya 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Periode Penelitian: Tahun 2019-2023. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda.	perimbangan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, Retribusi daerah tidak berpengaruh dan signifikan secara individual.	en dan Ekonomi (JBME), Volume & Nomor: Vol. 6, No. 3. Bulan & Tahun Terbit: Juli 2025. e-ISSN: 2745-7281.
16	Sindy Utami, Maulidah Narastris, Tahun 2020-2023, di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Belanja Pegawai. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah. Sampel yang digunakan adalah sampel	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal. Tempat penelitian: di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur. Periode	Pendapatan Asli Daerah dan belanja pegawai secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal secara parsial tidak	Jurnal Internasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Volume & Nomor: Vol. 2, No. 1. Tahun Terbit: 2025.

		jenuh.	Penelitian: Tahun 2020- 2023.	berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Halaman: 174-188. e-ISSN: 3046- 9376. p- ISSN: 3048- 0396.
17	Wike Nurliza Arpani, Halmawati, Tahun 2010- 2018, Pada Kabupaten/K ota Di Provinsi Riau	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah Tempat penelitian: di Kab/Kota Provinsi Riau Periode Penelitian: 2010-2018. Metode analisis data: <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM). Sampel yang digunakan adalah total <i>sampling</i> .	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal tidak terbukti memediasi hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan tingkat kemandirian	Jurnal Eksplorasi i Akuntansi Vol. 2, No 1, Seri D, Februari 2020, Hal 2373- 2390. ISSN: 2656- 3649 (Online)

				keuangan daerah.	
18	Baldric Siregar dan Nurna Pratiwi, 2009-2013, Seluruh kabupaten/kota Indonesia	Variabel Independen: Belanja Pegawai. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Ukuran, Usia, status, jumlah SKPD, leverage. Teknik Analisis Data Partial Least Square (PLS). Tempat penelitian: di Seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Periode penelitian: Tahun 2009-2013. Metode analisis data: <i>Partial Least Square</i> (PLS). Sampel yang digunakan adalah <i>Purposive sampling</i> .	Ukuran, usia, status, populasi, jumlah SKPD, dan <i>leverage</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja pegawai secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 19, No. 2, September 2017: 65–71 ISSN 1411-1438 / ISSN 2338-8234 daring
19	Nurul Mizna Sukma, Ningrum Tria Chema, Ridho Wahyu	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai	Variabel Independen: Belanja Modal, Ukuran pemerintah	Belanja modal dan belanja pegawai secara parsial berpengaruh positif dan	Jurnal Pembangunan Brasil (Brazilian Journal of

Ginting, Iskandar, 2020-2022, di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	daerah, kekayaan daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tempat penelitian: di Kab/Kota Sumatera Utara. Periode penelitian: 2020-2022. Metode analisis data: Regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> .	signifikan terhadap kemandirian keuangan. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, belanja modal, belanja pegawai, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Developm ent) Volume & Nomor: Vol. 10, No. 1 Tahun Terbit: Januari 2024. Halaman: 258–281 ISSN: 2525- 8761
---	---	---	--	--

20	Ema Nur Indah Fitriyani, Agus Endro Suwarno, 2016-2019. Pada 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah	Variabel Independen: Belanja Pegawai. Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Tempat Penelitian: di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode penelitian: Tahun 2016-2019. Metode analisis data: Regresi Linier Berganda. Sampel yang digunakan adalah <i>purposive sampling</i> .	Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Belanja modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh signifikan	<i>Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Call for Paper UPN "Veteran" Jawa Timur.</i> Vol. 1 No. 1.1 Mei 2021, hal. 61 – 69. ISSN 2776-2092 (Online)
----	--	---	---	--	---

	terhadap kemandirian keuangan daerah
Melati Sukma Dewi (2025) Dengan Judul Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025). Variabel X_1 (Dana Perimbangan), X_2 (Belanja Pegawai) dan Variabel Y (Kemandirian Keuangan Daerah)	

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dana perimbangan dan belanja pegawai sebagai variabel independen (X), dan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen (Y).

Menurut Efriyanto et al., (2023) Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai dan mempertanggungjawabkan keuangannya sendiri serta melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunannya sendiri dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019:140).

Dalam konteks keuangan daerah, salah satu elemen yang mempengaruhi kemandirian daerah adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun indikator dari dana perimbangan yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengelola Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan. Dana Perimbangan berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan fiskal antar daerah, meningkatkan kapasitas fiskal, dan memperkuat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas. Melalui pengelolaan yang efektif, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta mendukung kegiatan ekonomi daerah. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara bertahap sehingga Kemandirian Keuangan Daerah dapat semakin kuat (Mulia & Widiatmoko, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Arpani & Halmawati, (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah karena dana tersebut mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui pembangunan

yang produktif. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ardinugroho et al., (2021) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, karena tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat yang mengurangi dorongan untuk menggali sumber pendapatan asli daerah.

Hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti et al., (2022) dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah, karena dana tersebut lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan pelayanan dasar, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian keuangan daerah.

Selain dari sisi penerimaan, struktur belanja pegawai juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 146 ayat (1) Belanja Pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pegawai, yang meliputi aparatur sipil negara, kepala daerah, dan anggota DPRD. Belanja pegawai daerah sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, serta tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya. Adapun indikator dari belanja pegawai yaitu total belanja pegawai dibagi dengan total belanja daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu mengelola belanja pegawai secara efektif dan proporsional. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al., (2022) menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena belanja pegawai yang optimal dapat meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik sehingga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Ardini, (2019) menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, karena porsi belanja pegawai yang terlalu besar dapat mengurangi alokasi dana untuk sektor produktif yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Hal itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Defitri, (2020) bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, karena pengeluaran untuk belanja pegawai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Belanja pegawai lebih bersifat rutin dan administratif, sehingga tidak berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Teori yang sejalan dengan kemandirian keuangan daerah adalah *Stewardship Theory*. Menurut Oktaliza et al., (2020) *Stewardship Theory* dapat dihubungkan dengan sektor publik karena pihak *steward* bertindak berdasarkan keinginan *principal*. Yang berarti pihak pemerintah akan melakukan tugasnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Teori *stewardship*

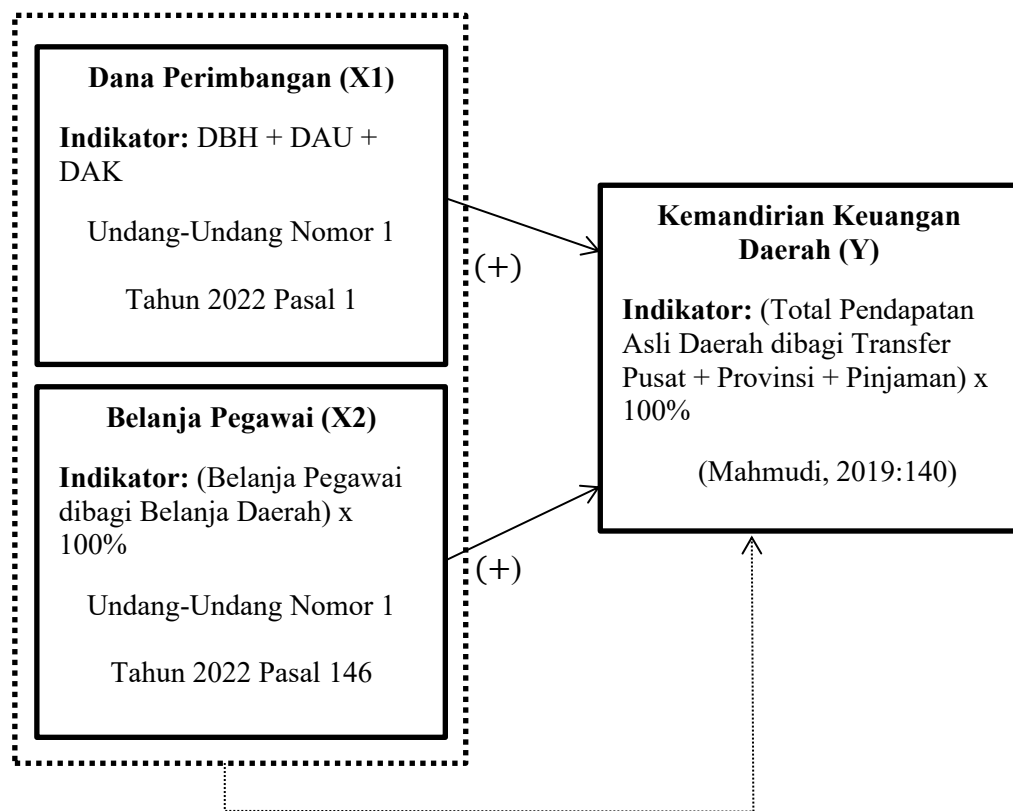
mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi menggambarkan *output* yang maksimal akan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal terhadap pihak *principal* akan menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat sebagai *steward* sangat baik

Menurut Mulia & Widiatmoko, (2025) dana perimbangan dapat dipahami sebagai sumber dana yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah. Dalam *teori stewardship*, aparat pemerintah dipandang sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan publik dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dana yang berasal dari pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran, tetapi juga dikelola secara efektif dan bertanggung jawab agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sehingga secara teoritis dana perimbangan dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, alokasi belanja pegawai menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam perspektif *stewardship theory*, aparat pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan belanja pegawai yang tepat dapat mendorong peningkatan kinerja aparatur, sehingga berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan dan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. Pada akhirnya,

kondisi tersebut dapat mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi sumber daya dan penguatan kapasitas fiskal daerah, sehingga secara teoritis belanja pegawai dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dari uraian diatas, maka dibuat sebuah kerangka pemikiran teoritis yang akan menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya.



Keterangan: —————> = secara parsial

.....> = secara simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H₁: Dana perimbangan dan belanja pegawai secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025.

H₂: Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025.

H₃: Belanja Pegawai secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2025.